

KETIDAKPARALELAN BENTUK DALAM KALIMAT PERINCIAN: SEBUAH KESALAHAN GRAMATIKAL

TYPE OF UNPARALLELISM IN DETAIL SENTENCES : AN UNGRAMMATICAL

Ririen Ekoyanantiasih
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta
Pos-el: ririen_suladi@yahoo.co.id
Telepon 081385081280

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketidakparalelan bentuk di dalam kalimat perincian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan memaparkan strategi pemaparan kalimat-kalimat perincian di dalam ragam bahasa tulis, seperti *Kompas* (Februari—Maret 2010), *Media Indonesia* (Februari—Maret 2010), Majalah *BPPT* (No LVIII 2000), dan *LAN* (2000) sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakparalelan bentuk di dalam kalimat perincian. Ketidakparalelan tersebut ditemukan dalam bentuk kata, frasa, dan klausa. Ketidakparalelan tersebut dapat membuat kalimat tidak efektif dan tidak gramatikal. Dalam penelitian ini kalimat perincian yang tidak paralelan tersebut diubah menjadi bentuk yang paralelan. Untuk mencapai keparalelan dalam kalimat perincian, baik pada tataran kata, frasa, maupun klausa, strategi yang dapat dilakukan dengan pengimbuhan, pengaktifan, atau pemasifan. Dengan demikian, teknis analisis data menggunakan kaidah morfologi dan sintaksis.

Kata kunci: paralelisme, ketidakparalelan, pengaktifan, pemasifan, morfologi, dan sintaksis

Abstract

This research's purpose to describe type of unparallelism in detail sentence. This research use descriptive method that explain parallelism strategy in details sentence in register written language, like Kompas (February-March 2010), Media Indonesia (February-Maret 2010), magazine BPPT (No. LVIII 2000), and LAN (2000). This research showed that be found unparallelisms in detail sentence. Those unparallelisms can be found in word, phare, and clause. Unparallelisms can make sentence uneffective and ungrammatical. In this research, unparallelisms in detail sentence be changed to parallelisms. For arrive parallelism in details sentence, strategy was done with affixation, activation, or passivity in sentence of detail. Thus, analysis teknical use proces morphology and syntax .

Keywords: parallelism, unparallelism, activation, passivity, morphology, and syntax

PENDAHULUAN

Yunus *et al.* (2013: 2.34) dan Arifin dan Amran Tasai (2009:96) mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti yang ada dalam pikiran

pembicara atau penulis. Lebih lanjut dikatakan pula bahwa sebuah kalimat efektif mempunyai ciri yang khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Selain itu, Arifin dan Amran Tasai

(2009:66) juga menjelaskan kalimat gramatikal, yaitu kalimat yang mengandung satuan fungsional kalimat, seperti subjek, predikat, dan objek. Dari paparan tersebut, terlihat bahwa begitu banyak masalah yang tercakup di dalam kalimat efektif dan gramatikal. Namun, penelitian ini akan memfokuskan kajian keparalelan bentuk di dalam kalimat perincian, khususnya terhadap kalimat yang mengandung unsur ketidakparalelan bentuk.

Selanjutnya, berkaitan dengan latar belakang tersebut, masalah penelitian ini adalah dalam tataran apa ketidakparalelan bentuk terjadi di dalam kalimat perincian? Dengan memerhatikan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan ketidakparalelan bentuk di dalam kalimat perincian.

Berkaitan dengan hal itu, makalah ini menyajikan analisis keparalelan bentuk dalam ragam bahasa tulis yang mencakupi analisis morfologi dan sintaksis. Analisis morfologi digunakan untuk menganalisis bentuk unsur kalimat, apakah itu melalui perubahan kategori kata atau perubahan kata secara afiksasi. Sementara itu, analisis sintaksis digunakan untuk menganalisis dan menentukan satuan-satuan fungsi kalimat.

Telah dijelaskan bahwa salah satu norma kebahasaan yang berkaitan dengan kejelasan gagasan dalam kalimat adalah paralelisme. Dalam linguistik, ada dua macam istilah yang dipakai dalam penelitian keparalelan, yaitu **paralelisme dan kesejajaran**. Para linguis yang menggunakan istilah paralelisme adalah Keraf (1991), Parera (1980), dan Kridalaksana *et al.* (1985). Sementara itu, sebutan kesejajaran dipakai oleh Zulkarnain dan Budiono Isas (2000) dan Sugono (1991). Dalam makalah ini, penulis menggunakan istilah keparalelan dan paralelisme.

Ada dua macam paralelisme, yaitu (1) paralelisme bentuk dan (2) paralelisme makna (Alwi *et al.*, 2008:13-20). Selama ini kedua bentuk keparalelan tersebut digunakan sebagai strategi untuk menata sebuah kalimat yang efektif atau untuk mengutuhkannya sebuah wacana yang gramatikal (Yunus *et al.*, 2013: 2.34) dan Arifin dan Amran Tasai

(2009:96). Kemudian, di dalam penelitian ini strategi tersebut diaplikasikan untuk meneliti kalimat-kalimat perincian, apakah menemukan unsur ketidakparalelan bentuk di dalamnya. Penelitian ini hanya memfokuskan kajian keparalelan bentuk dan bukan keparalelan makna. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengumpulkan data berupa ketidakparalelan bentuk di dalam kalimat perincian.

Sehubungan dengan pentingnya keparalelan di dalam susunan kalimat efektif, satuan-satuan slot pengisi fungsional kalimat harus diperhatikan, seperti satuan pengisi fungsi sintaksis subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Satuan-satuan fungsi sintaksis tersebut harus dalam keadaan paralel.

Berdasarkan pernyataan tersebut, konsep paralelisme dapat dirumuskan, yaitu adanya keparalelan atau kesejajaran bentuk antara satuan-satuan pengisi fungsi sintaksis kalimat. Misalnya, jika kalimat itu berupa kalimat perincian, antara satuan perincian yang pertama dan satuan perincian yang kedua dan yang lain harus dalam keadaan yang paralel. Artinya, apabila satuan perincian pertama berupa frasa nominal, satuan perincian kedua dan seterusnya harus pula berupa frasa nominal.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini berisi sebuah analisis tentang ketidakparalelan dan keparalelan bentuk satuan fungsi di dalam kalimat perincian. Bertolak dari hal tersebut, dilakukan beberapa teknik analisis, seperti teknis analisis morfologi dan analisis sintaksis. Kerangka teori yang digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis ketidakparalelan dan keparalelan adalah buku rujukan produk Pusat Bahasa (Alwi *et al.*, 2008).

(1) Kaidah Morfologi

Di dalam penelitian ini kaidah morfologi digunakan untuk menganalisis bentuk unsur-unsur kalimat melalui perubahan kategori kata atau perubahan kata akibat afiksasi. Alwi *et al.* (2008: 118—

121) menjelaskan kaidah morfofonemik prefiks *meng-*. Dalam kaidah itu prefiks tersebut digunakan sebagai titik tolak analisis perubahan fonem yang terjadi pada prefiks (regresif) atau pada dasar kata yang mengikutinya (progresif). Prefiks *me-* dilihat sebagai salah satu alomorf *meng-*. Alwi *et al.* (2008: 118—121) mengemukakan lima kaidah morfofonemik, yaitu sebagai berikut.

(a) Prefiks *meng-* + fonem /a, i, u, e, o, |, k, g, h, x/ menjadi *meng-* /m| - / jika kesepuluh fonem itu masing-masing mengawali dasar kata.

Misalnya: *meng-* + ambil ---> mengambil

meng- + kalah ---> mengalah

fonem /k/ seperti pada dasar *kalah* akan luluh ke dalam fonem /n/

(b) Prefiks *meng-* + fonem /l, m, n, ʎ, ʀ, r, y, w/ menjadi *me-* /ŋ| - / jika ke-delapan fonem itu, masing-masing mengawali dasar kata.

Misalnya: *meng-* + latih ---> melatih

meng- + makan ---> memakan

(c) Prefiks *meng-* + fonem /d, t/ menjadi *men-* /m|n- / jika ke dua fonem itu, masing-masing mengawali dasar kata.

Misalnya: *meng-* + datangkan ---> mendatangkan

meng- + tanamkan ---> menanamkan

fonem /t/ seperti pada dasar *tanam* akan luluh ke dalam fonem /n/

(d) Prefiks *meng-* + fonem /b, p, f / menjadi *me-* /m|m- / jika ketiga fonem itu, masing-masing mengawali dasar kata.

Misalnya: *meng-* + babat ---> membabat

meng- + pasang ---> memasang

fonem /p/ seperti pada dasar *pasang* akan luluh ke dalam fonem /m/

(e) Prefiks *meng-* + fonem /c, j, s, ~s / menjadi *menye-* /m|ʎ - / jika keempat fonem itu, masing-masing mengawali dasar kata.

Misalnya: *meng-* + cari ---> mencari

meng- + satukan ---> menyatukan

fonem /s/ seperti pada dasar *satu* akan luluh ke dalam fonem /ʎ/

(2)Kaidah Sintaksis

Kaidah sintaksis digunakan untuk menganalisis dan menentukan satuan-satuan fungsi kalimat. Berkaitan dengan analisis tersebut, Alwi *et al.* (2008:96) menjelaskan verba dari segi perilaku sintaksisnya. Menurutnya, verba merupakan unsur yang sangat penting dalam kalimat karena verba berpengaruh besar terhadap unsur-unsur lain yang harus atau boleh ada dalam kalimat tersebut. Ia memberi contoh verba *mendekat* yang mengharuskan adanya subjek sebagai pelaku, tetapi melarang munculnya nomina di belakangnya. Sebaliknya, verba *mendekati* mengharuskan adanya nomina di belakangnya.

Menurut Alwi *et al.* (2008:97), perilaku sintaksis seperti tersebut berkaitan erat dengan makna dan sifat ketransitifan verba. Dari segi sintaksisnya, ketransitifan verba ditentukan oleh dua faktor, yaitu (1) adanya nomina yang berdiri di belakang verba yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat aktif dan (2) kemungkinan objek itu berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya verba dapat dibedakan atas verba transitif dan verba taktransitif.

Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Verba taktransitif adalah verba yang tidak memiliki nomina di belakangnya yang dapat pula berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif.

Alwi *et al.* (2008:22) menjelaskan bahwa pemakaian bahasa yang mengikuti

kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar. Sementara itu, Arifin dan Amran Tasai (2009:25) juga menjelaskan suatu kalimat yang benar karena memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur, yaitu subjek, predikat, dan objek. Oleh karena itu, gramatikal atau tidaknya suatu kalimat diukur berdasarkan kaidah kebahasaan yang disandangnya. Dengan kata lain, kalimat gramatikal adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Sementara itu, kalimat yang tidak mengikuti kaidah tata bahasa adalah kalimat yang tidak gramatikal.

(3) Kalimat Perincian

Data penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung perincian. *KBBI* (2008:1057) menjelaskan bahwa kata perincian mempunyai makna ‘uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu’. Dengan demikian, kalimat perincian adalah kalimat yang mengandung uraian sampai ke bagian yang kecil-kecil, satu demi satu.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sudaryanto (1986:15—18), metode deskriptif dilakukan berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya. Dengan demikian, hasil yang diperoleh atau yang dicatat berupa pemerian bahasa yang bisa dikatakan sebagai paparan seperti apa adanya. Berdasarkan uraian tersebut, metode deskriptif dilakukan dengan cara memaparkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian.

Penelitian ini mengambil sampel dari sumber-sumber tertulis, seperti (1) majalah *Badan Pengkajian dan Penerangan Teknologi (BPPT)* (2000), (2) *Kompas* (2010), (3) *Media Indonesia* (2010) dan (4) laporan teknis, seperti laporan *Lembaga Administrasi Negara* (2000). Data penelitian ini diambil dari rubrik ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dimuat dalam harian *Kompas* (Februari—Maret 2010) dan harian *Media Indonesia* (Februari—Maret 2010) serta majalah *BPPT*. Pengambilan data dilakukan secara acak, yaitu dalam satu minggu diambil

satu harian tanpa memperhatikan tanggal pemuatannya. Dengan demikian, ada delapan surat kabar edisi terbitan *Kompas* yang diambil sebagai data, yaitu *Kompas* yang terbit tanggal 7 Februari, 14 Februari, 21 Februari, 7 Maret, 24 Maret, 21 Maret, dan 28 Maret 2010. Selain itu, juga diambil delapan surat kabar edisi terbitan *Media Indonesia*, yaitu yang terbit tanggal 6 Februari, 13 Februari, 20 Februari, 27 Februari, 6 Maret, 13 Maret, 20 Maret, dan 27 Maret 2010. Sementara itu, sumber data iptek juga diambil dari majalah *BPPT* No. LVIII 2000 dan laporan teknis tahunan yang dibuat *Lembaga Administrasi Negara* (2000).

Menurut mediumnya, ragam bahasa Indonesia mencakupi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis (Alwi, 2008:3-4). Di antara kedua ragam bahasa itu, ragam bahasa tulis yang dijadikan sebagai data utama karena sangat relevan dengan topik tulisan ini. Sumber data tersebut diprediksi mengandung ketidakparalelan bentuk.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah naskah penelitian sesuai dengan metode penelitian. Teknik tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu kalimat-kalimat yang dihasilkan atau yang tertuang di dalam buku-buku, majalah, dan surat kabar yang merupakan sampel penelitian ini. Dalam sampel tersebut, hanya kalimat perincian yang ditandai dan yang dikumpulkan sebagai bahan analisis. Kemudian, kalimat-kalimat perincian tersebut diklasifikasikan berdasarkan unsur sintaksis yang paralel dan yang tidak paralel. Karena kajian ini memfokuskan ketidakparalelan, data yang berupa unsur-unsur sintaksis yang paralel disisikan dan tidak digunakan dalam analisis.

Selanjutnya, di dalam teknik pengumpulan data ini, kalimat perincian yang tidak paralel tersebut diklasifikasi berdasarkan tiga kelompok, yaitu kelompok kata, frasa, dan klausa. Dengan klasifikasi tersebut, penelitian ini akan memperoleh tiga macam data, yaitu data ketidakparalelan bentuk dalam (a) kata, (b) frasa, dan (c) klausa.

Masing-masing ketiga kelompok data tersebut dianalisis dengan kaidah morfologi dan sintaksis kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(1) Ketidakparalelan Bentuk Satuan-Satuan Perincian Berupa Kata

Percontoh data menunjukkan bahwa kata dapat menjadi satuan-satuan perincian di dalam kalimat perincian, seperti terlihat pada contoh kalimat berikut ini.

(1a) *Industri logam dasar nonbesi menghasilkan limbah padat dari pengecoran, percetakan, dan pelapisan yang menghasilkan limbah cair pekat beracun sebesar tiga persen dari volume limbah cair yang diolah. (Kompas, 2010)*

(2a) *Penerapan tersebut meliputi, yaitu*
a. *kekuatan,*
b. *efisiensi, dan*
c. *efektivitas. (Kompas, 2010)*

(3a) *Yang pertama adalah pendekatan sektoral, yaitu APBN dibagi menjadi delapan belas sektor (pertanian, perdagangan, industri, dan lain-lain). (Media Indonesia, 2010)*

Ketiga kalimat di atas adalah kalimat perincian. Sebagai satuan perincian, bentuk satuan perincian yang berupa kata tersebut memperlihatkan ketidakparalelan. Kalimat (1a) adalah kalimat tunggal yang diisi oleh satuan fungsional subjek (*Industri logam dasar nonbesi*), satuan fungsional predikat (*menghasilkan*), satuan fungsional objek (*limbah padat*), dan satuan fungsional keterangan (*dari pengecoran, percetakan, dan pelapisan yang menghasilkan limbah cair pekat beracun sebesar tiga persen dari volume limbah cair yang diolah*).

Satuan pengisi fungsi keterangan tersebut dapat diidentifikasi sebagai satuan-satuan perincian yang memperlihatkan ketidakparalelan bentuk. Hal itu terjadi karena bentuk satuan rincian pertama dan kedua mendapat konfiks *pe-...-an*. Sementara itu,

bentuk satuan rincian ketiga mendapat konfiks *per-...-an*. Jadi, terdapat dua macam konfiks di dalam kalimat (1a), yaitu konfiks *pe-...-an* dan konfiks *per-...-an*. Agar satuan-satuan pengisi fungsi sintaksis keterangan itu tidak memperlihatkan dua macam konfiks, bentuk satuan-satuan itu harus diparalelkan, yaitu dengan pelekatan konfiks *pe-...-an* pada verba dasar *cetak* sehingga terbentuk nomina turunan *pencetakan*, seperti terlihat pada kalimat ubahan (1b).

Selanjutnya, satuan fungsional pada kalimat (2a) di atas dapat diidentifikasi sebagai satuan fungsional subjek (*penerapan tersebut*), satuan fungsional predikat (*meliputi*), dan satuan fungsional pelengkap (*kekuatan, efisiensi, dan efektivitas*). Satuan pengisi fungsi pelengkap mengandung satuan-satuan perincian yang memperlihatkan ketidakparalelan bentuk sehingga kalimat tersebut menjadi tidak gramatikal.

Ketidakparalelan bentuk itu terjadi karena satuan perincian pertama dilekati dengan konfiks *ke-...-an* sehingga terbentuk satuan nomina turunan *kekuatan*. Sementara itu, satuan perincian kedua dan ketiga (*efisiensi dan efektivitas*) tidak dilekati dengan konfiks sehingga satuan nomina dasarnya tetap *efisiensi dan efektivitas*. Agar ketidakparalelan itu tidak terjadi, strategi pemaralelan bentuk harus diaplikasikan dengan dua strategi, yaitu (a) pengubahan nomina dasar dan (b) pelekatan konfiks *ke-...-an*. Teknik strategi pertama ialah nomina dasar *efisiensi dan efektivitas* diganti menjadi *efisien dan efektif*. Strategi kedua dilakukan dengan cara pelekatan konfiks *ke-...-an* pada nomina *efisien dan efektif* sehingga terbentuk nomina *keefisienan dan keefektifan*, seperti terlihat pada kalimat ubahan (2b) di bawah ini.

Selanjutnya, kalimat (3a) di atas terdiri atas satuan fungsional subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Satuan-satuan pengisi fungsi keterangan tersebut memperlihatkan ketidakparalelan bentuk dalam kata yang mengakibatkan kalimat tersebut menjadi tidak gramatikal. Ketiga satuan fungsi sintaksis keterangan tersebut berupa nomina. Namun, bentuk satuan

industri berbeda dengan bentuk satuan *pertanian* dan *perdagangan*.

Jika ditinjau dari kelas katanya, kata *industri* merupakan nomina dasar, sedangkan kata *pertanian* dan *perdagangan* merupakan nomina turunan. Sementara itu, dari bentuk katanya, satuan *industri* tergolong sebagai kata dasar karena kata itu tidak mengalami afiksasi, sedangkan satuan *pertanian* dan *perdagangan* tergolong sebagai kata turunan karena sudah mengalami afiksasi dengan konfiks *ke-...-an*. Untuk menjaga kecermatan pemakaian bahasa Indonesia dalam ragam tulis ini, satuan perincian yang tidak paralel dapat diparalelkan bentuknya. Strategi pamaralelan dilakukan dengan melekatkan konfiks *pe-...-an* pada nomina dasar *industri* sehingga diperoleh kalimat (3b). Berikut di bawah adalah ketiga kalimat yang telah mengalami perubahan sehingga mengandung perincian yang paralel.

(1b) *Industri logam dasar nonbesi menghasilkan limbah padat dari pengecoran, pencetakan, dan pelapisan yang menghasilkan limbah cair pekat beracun sebesar tiga persen dari volume limbah cair yang diolah.*

(2b) *Penerapan tersebut meliputi*

- a. *kekuatan,*
- b. *keefisienan, dan*
- c. *keefektifan.*

(3b) *Yang pertama adalah pendekatan sektoral, yaitu APBN dibagi menjadi delapan belas sektor (pertanian, perdagangan, perindustrian, dan lain-lain).*

Berikut ini masih berkaitan dengan ketidakparalelan bentuk pada satuan perincian yang berupa kata, seperti pada contoh kalimat (4a—6a).

(4a) *Pendek kata, keberadaan tenaga listrik sangat mutlak untuk kenyamanan, kelancaran, dan efisiensi. (Media Indonesia, 2010)*

(5a) *Tinjauan ketelitian peralatan minimal dapat dilihat dari tiga sudut, yakni sensitifitas transducernya, ketepatan konversi ADC, dan kesalahan proses komputa. (Kompas, 2010)*

(6a) *Pokok pembahasan dalam tulisan ini meliputi ilustrasi dan persamaan gerak polygon. (Majalah BPPT, 2010)*

Ketiga pasang kalimat di atas masih memperlihatkan ketidakparalelan dalam bentuk kata. Jika diperhatikan, satuan fungsional keterangan pada kalimat (4a) mengandung satuan rincian yang tidak paralel. Ketidakparalelan itu terjadi karena satuan-satuan rincian tersebut ada yang mengalami pengimbuhan dan ada pula yang tidak mengalami pengimbuhan. Agar bentuk satuan-satuan pengisi satuan fungsional keterangan itu paralel, dapat dilakukan alternatif pamaralelan bentuk dengan membubuhkan konfiks *ke-...-an* pada satuan *efisien* sehingga terbentuk satuan *keefisienan*. Ubahan bentuk kata tersebut dapat dilihat pada kalimat (4b).

Selanjutnya, kalimat perincian (5a) tersebut berpola Subjek + Predikat + Keterangan. Jika diamati dengan cermat, bentuk satuan fungsional keterangan tersebut mengandung perincian yang tidak paralel. Ketidakparalelan tersebut terjadi karena satuan-satuan perincian tersebut ada yang mengalami proses derivasi dan pelekatan morfem terikat *-itas*. Agar bentuk satuan-satuan pengisi satuan fungsional keterangan itu paralel, dapat dilakukan alternatif pamaralelan bentuk dengan membubuhkan konfiks *ke-...-an* pada satuan *sensitif* sehingga terbentuk satuan *kesensitifan*. Dengan demikian, bentuk-bentuk satuan kata pada frasa (*kesensitifitasan transducernya*) sudah paralel bentuknya dengan satuan-satuan lain, yaitu (*ketepatan konversi ADC, dan kesalahan proses komputasi*), seperti terlihat pada kalimat (5b).

Pembahasan selanjutnya adalah kalimat perincian (6a) yang memperlihatkan pola Subjek + Predikat + Objek. Bentuk satuan fungsional objek tersebut mengandung satuan rincian yang tidak paralel.

Ketidakparalelan tersebut terjadi karena satuan-satuan perincian tersebut ada yang mengalami proses derivasi dan pelekatan morfem dengan konfiks *per-...-an*. Agar bentuk satuan-satuan pengisi satuan fungsional objek itu paralel, dapat dilakukan alternatif pamaralelan bentuk dengan membubuhkan konfiks *per-...-an* pada satuan *ilustrasi* sehingga terbentuk satuan *perilustrasian*, seperti dalam kalimat ubahan (6b).

Berikut di bawah ini adalah ketiga kalimat yang telah mengalami perubahan sehingga mengandung perincian yang paralel.

(4b) *Pendek kata, keberadaan tenaga listrik sangat mutlak untuk kenyamanan, kelancaran, dan keefisienan.*

(5b) *Tinjauan ketelitian peralatan minimal dapat dilihat dari tiga sudut, yakni kesensitifan transducernya, ketepatan konversi ADC, dan kesalahan proses komputasi.*

(6b) *Pokok pembahasan dalam tulisan ini meliputi perilustrasian dan persamaan gerak polygon.*

(2)Ketidakparalelan Bentuk Satuan-Satuan Perincian Berupa Frasa

Berikut ini adalah contoh kalimat perincian yang mengandung ketidakparalelan bentuk dalam frasa.

(7a) *Adapun nama-nama praktisi pakar serta jabatannya yang menjadi responden pada penarikan opini tahap pertama adalah*

a. *dr. Eka Prasetya, Kepala Biro Umum Departemen Kesehatan Jakarta;*

b. *Kabag Keuangan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;*

c. *Drs. Sumardi, Kepala Bagian Umum, Pemda Dati II Bandung;*

(Laporan LAN, 2000)

(8a) *Anggaran Pembangunan:*

a. *Biaya upah.*

b. *Pembebasan pengadaan tanah.*

c. *Pembelian bahan bangunan.*

d. *Biaya konstruksi (termasuk biaya pengawasan dan mandor).*

e. *Pembelian mesin/alat.*

f. *Pengadaan sarana.* (Majalah BPPT, 2000)

(9a) *Anggaran rutin:*

1. *Pembayaran gaji, tunjangan, dan pensiun,*

2. *Pembelian barang,*

3. *Dana pemeliharaan (fasilitas)*

4. *Biaya perjalanan (dinas),*

5. *SDO/Subsidi Daerah Otonomi,*

6. *Cicilan utang.* (Laporan LAN, 2000)

Ketiga kalimat di atas masing-masing mengandung satuan perincian yang berupa frasa. Satuan perincian tersebut tidak paralel dan mengakibatkan ketiga kalimat itu tidak gramatikal. Analisis di bawah ini memaparkan bentuk satuan perincian yang tidak paralel tersebut.

Kalimat (7a) mengandung satuan fungsional subjek yang diisi oleh rangkaian satuan-satuan (*nama-nama praktisi/pakar serta jabatannya yang menjadi responden pada penarikan opini tahap pertama*). Satuan fungsional predikat diisi oleh satuan kata *adalah* dan satuan fungsional pelengkap diisi oleh rangkaian satuan-satuan rincian yang terdiri atas:

a. *dr. Eka Prasetya, Kepala Biro Umum Departemen Kesehatan Jakarta;*

b. *Kabag Keuangan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;*

c. *Drs. Sumardi, Kepala Bagian Umum, Pemda Dati II Bandung;*

Jika diamati, Ketiga perincian tersebut memperlihatkan ketidakparalelan bentuk, yaitu pada rincian b. Pada satuan perincian bagian (a), nama *Eka Prasetya* diatasi oleh gelar dokter (*dr.*) dan jabatan *Kepala Biro Umum Departemen Kesehatan*. Di dalam satuan perincian tersebut bentuk *dr. Eka*

Prasetya dan *Kepala Biro Umum Departemen Kesehatan Jakarta* masing-masing merupakan frasa nominal dan keduanya mengacu kepada orang yang sama. Dengan kata lain, frasa *dr. Eka Prasetya* dan *Kepala Biro Umum Departemen Kesehatan Jakarta* itu beraposisi. Demikian pula halnya dengan satuan perincian bagian (c), yang juga mengandung nama diri yang dilekati dan diwatasi oleh gelar (*Drs.*) dan jabatan (*Kepala Bagian Umum Pemda Dati II Bandung*). Keduanya mengacu kepada satu orang yang sama, yaitu Sumadi.

Jika paparan tersebut dibandingkan dengan satuan perincian (b), hanya terdapat frasa jabatan (*Kabag Keuangan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat*). Sementara itu, nama diri di dalam perincian (b) tidak ada. Hal ini menggambarkan bahwa satuan rincian tersebut tidak paralel. Ketidakparalelan tersebut dapat mengakibatkan kalimat (6a) menjadi tidak gramatikal.

Agar kecermatan pemakaian bahasa Indonesia terjaga, terutama di dalam ragam tulis, bentuk satuan frasa yang menjadi satuan perincian (b) dapat diparalelkan. Untuk kalimat perincian (b) tersebut, dapat diambil nama seseorang yang mempunyai jabatan *Kabag Keuangan* di instansi yang bersangkutan. Diandaikan nama Ahmad Bakri adalah seseorang yang memangku jabatan *Kabag Keuangan*, maka strategi pamaralelan yang dilakukan adalah dengan mencantumkan nama diri (Ahmad Bakri) yang diikuti dengan nama gelar jika ada, seperti terlihat dalam kalimat 7b.

Ketidakparalelan bentuk dalam frasa pada kalimat perincian selanjutnya diperlihatkan oleh kalimat (8a). Satuan unsur kalimat yang tidak paralel itu meliputi satuan perincian (a) dan (d). Sementara itu, satuan perincian pada bagian (b), (c), (e), dan (f) mengandung satuan unsur kalimat yang paralel karena dalam rincian, satuan awal frasa nominal itu dilekati oleh konfiks *pe-...-an* yang melekat pada verba dasar *biaya upah* dan *biaya konstruksi*.

Dari serangkaian uraian di atas jelas terlihat bahwa bentuk satuan perincian bagian

(a) dan bagian (d) tidak paralel dan dapat mengakibatkan kalimat menjadi tidak gramatikal dengan bentuk satuan perincian yang lain. Ketidakparalelan tersebut terjadi karena satuan awal perincian (b) dan (d) tersebut belum memperoleh konfiks *pe-...-an*. Agar kecermatan pemakaian satuan-satuan bahasa Indonesia tetap dapat terjaga, bentuk-bentuk keterangan di dalam setiap satuan perincian tersebut dapat diparalelkan.

Strategi pamaralelan bentuk dapat dilakukan dengan melekatkan atau membubuhi konfiks *pe-...-an* pada nomina dasar *biaya* sehingga terbentuk nomina turunan *pembiayaan*. Dengan pembubuhan konfiks *pe-...-an* pada nomina dasar *biaya*, satuan perincian bagian (a) dan (d) masing-masing berubah menjadi frasa *pembiayaan upah* (di bagian a) dan frasa *pembiayaan konstruksi* (di bagian d). Dengan demikian, kalimat perincian (8a) yang tidak paralel tersebut berubah menjadi kalimat perincian yang paralel, seperti terlihat pada kalimat (8b).

Masih pembahasan tentang ketidakparalelan dalam bentuk frasa, enam perincian di dalam kalimat (9a) tersebut juga memperlihatkan ketidakparalelan pada bagian 3, 4, 5, 6. Bentuk satuan perincian nomor satu dan dua mempunyai bentuk yang paralel, yaitu berupa frasa nominal dengan pelekatan konfiks *pe-...-an* pada verba dasar *bayar* dan *beli*. Dengan mengacu pada uraian tersebut, perincian 3, 4, 5, dan 6 dapat pula diparalelkan.

Strategi pamaralelan satuan perincian 3 dilakukan dengan cara memindahkan nomina *pemeliharaan* ke depan dan menghilangkan nomina *dana*. Penghilangan nomina *dana* tersebut dilakukan karena berkaitan dengan unsur kemubaziran kata. Penggunaan kata *anggaran* dan *dana* tidak efisien karena kedua kata itu sama-sama mengandung makna yang berhubungan dengan uang (KBBI, 2008:207). Dengan demikian, ubahan perincian bagian 3 tersebut menjadi *Pemeliharaan fasilitas*.

Selanjutnya, satuan perincian 4 memiliki kasus yang sama dengan perincian 3. Dengan demikian, strategi pamaralelan

satuan perincian bagian empat dapat juga dilakukan dengan cara memindahkan nomina *perjalanan* ke depan dan menghilangkan nomina biaya. Penghilangan nomina *biaya* tersebut juga dilakukan karena berkaitan dengan unsur kemubaziran kata. Dengan demikian, ubahan perincian bagian empat tersebut menjadi *Perjalanan dinas*.

Selanjutnya, strategi pemaalelan yang dilakukan pada perincian 5 dengan cara meletakkan kata *pemberian* di depan frasa nominal *SDO/Subsidi Daerah Otonomi*. Dengan demikian, ubahan rincian bagian lima tersebut menjadi *Pemberian SDO/Subsidi Daerah Otonomi*. Kemudian, perincian 6 dalam kalimat 9a dapat diparalelkan dengan memberi konfiks *pe-...-an* pada verba *cicil*. Dengan penambahan konfiks itu, satuan perincian bagian 6 berubah menjadi *pencicilan utang*, seperti terlihat pada kalimat (9b).

Berikut di bawah ini adalah ketiga kalimat yang telah mengalami perubahan sehingga mengandung perincian yang paralel.

(7b) *Adapun nama-nama praktisi pakar serta jabatannya yang menjadi responden pada penarikan opini tahap pertama adalah*

a. *dr. Eka Prasetya, Kepala Biro Umum Departemen Kesehatan Jakarta;*

b. *Ahmad Bakri, S.E., Kabag Keuangan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;*

c. *Drs. Sumardi, Kepala Bagian Umum Kanwil Depdikbud Proponsi Jawa Barat.*

(8b) *Anggaran pembangunan meliputi*

- a. *pembiayaan upah,*
- b. *pembebasan pengadaan tanah,*
- c. *pembelian bahan bangunan,*
- d. *pembiayaan konstruksi (termasuk biaya pengawasan dan mandor),*
- e. *pembelian mesin/alat, dan*
- f. *pengadaan sarana.*

(9b) *Anggaran rutin meliputi*

1. *pembayaran gaji, tunjangan, dan pensiun,*
2. *pembelian barang,*
3. *pemeliharaan fasilitas,*
4. *perjalanan dinas,*
5. *pemberian SDO (Subsidi Daerah Otonomi), dan*
6. *pencicilan utang.*

(3)Ketidakparalelan Bentuk Satuan-Satuan Perincian Berupa Klausa

Ketidakparalelan satuan perincian yang berupa kalimat juga ditemukan di dalam penelitian ini. Contohnya adalah sebagai berikut.

(10a) *Tingkat efisiensi dan efektivitas sistem penganggaran tersebut kurang karena masih adanya masalah-masalah sebagai berikut:*

1. *Tumpang tindih antara DIK dan DIP*

2. *Perkiraan dana pembangunan belum dihitung secara seksama*

3. *Prosedur keuangan yang terlalu kompleks*

4. *Lemahnya penjadwalan dan 'cross checking' antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya.*

5. *proses revisi terlalu panjang*

6. *Lemahnya daya dukung khususnya sumber daya manusia*

7. *Dominasi pemegang keputusan untuk persetujuan kegiatan oleh Bappenas masih sangat terasa. (Laporan LAN, 2000)*

(11a) *Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan pengkajian ini adalah:*

1. *Mengevaluasi sejauh mana efisiensi dan efektivitas administrasi perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.*

2. *Masalah yang menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas sistem yang ada diidentifikasi.*

3. *Merumuskan saran-saran perbaikan yang bersifat aplikatif terhadap administrasi perencanaan dan penganggaran tahunan.*
(Laporan LAN, 2000)

Jika dianalisis dari segi strukturnya, kalimat perincian (10a) berpola [IK]: (Subjek + Predikat + Keterangan) + [AK]: (konjungsi) + Predikat + Subjek. Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi *karena*. Dalam kalimat 10a tersebut rangkaian pengisi fungsi subjek kalimat ditunjukkan oleh kelompok kata (*tingkat efisiensi dan efektivitas sistem penganggaran tersebut*). Pengisi fungsi predikat kalimat ditunjukkan oleh kata *kurang*. Rangkaian pengisi fungsi keterangan kalimat ditunjukkan oleh kelompok kata (*karena masih adanya masalah-masalah*).

Sebagai struktur kalimat majemuk bertingkat, satuan pengisi unsur subjek dan predikat kalimat berfungsi sebagai induk kalimat (IK). Sementara itu, satuan pengisi unsur keterangan berfungsi sebagai anak kalimat (AK). Dengan demikian, anak kalimat tersebut mengandung kalimat rincian yang jika diamati memperlihatkan ketidakparalelan di antara satuan-satuan rinciannya.

Satuan perincian nomor 1 berupa AK (*Tumpang tindih antara DIK dan DIP*) Dari sudut struktur kalimat, frasa verbal *tumpang tindih* berfungsi sebagai predikat yang berdampingan dengan frasa nominal (*antara DIK dan DIP*) yang berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, satuan perincian 1 tersebut berpola Predikat + Objek.

Satuan perincian nomor 2 berupa AK yang ditunjukkan oleh kelompok kata (*Masalah-masalah perkiraan dana pembangunan belum dihitung secara seksama*). Secara struktural, AK tersebut berpola subjek + predikat + keterangan.

Satuan perincian nomor 3 berupa AK dengan kelompok kata (*masalah-masalah prosedur keuangan yang terlalu kompleks*) yang merupakan frasa nominal. Kelompok kata (*yang terlalu kompleks*) merupakan pewatas dari frasa nominal (*prosedur*

keuangan). Dari struktur kalimatnya, satuan perincian nomor 3 itu tidak mempunyai fungsional kalimat sehingga perincian itu tidak mempunyai pola kalimat, tetapi sebagai frasa nominal.

Satuan perincian 4 berupa AK yang ditunjukkan oleh kelompok kata (*lemahnya penjadwalan dan 'cross checking' antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya*). AK itu berpola predikat + subjek. Perincian 5 berupa AK yang ditunjukkan oleh kelompok kata (*proses revisi terlalu panjang*). AK itu berpola subjek + predikat. Perincian 6 berupa AK yang ditunjukkan oleh kelompok kata (*Lemahnya daya dukung khususnya sumber daya manusia*). AK tersebut berpola predikat + subjek. Perincian nomor 7 berupa kalimat dengan pola subjek + predikat. Secara struktural, frasa nominal (*Dominasi pemegang keputusan untuk persetujuan kegiatan oleh Bappenas*) merupakan subjek kalimat. Sementara itu, frasa adjektival (*masih sangat terasa*) merupakan predikat.

Paparan tersebut di atas memperlihatkan bahwa kalimat majemuk (kalimat 10a) tersebut mengandung perincian yang tidak paralel. Agar kecermatan pemakaian bahasa Indonesia ragam tulis itu terjaga, bentuk satuan-satuan perincian tersebut harus diparalelkan, sehingga akan dihasilkan ubahan kalimat perincian (10b) yang paralel.

Selanjutnya, kalimat (11a) juga mengandung satuan-satuan perincian kalimat yang tidak paralel. Kalimat tersebut berpola: keterangan + subjek + predikat + pelengkap. Dalam kalimat perincian (11a) itu, satuan keterangan ditunjukkan oleh (*berdasarkan identifikasi masalah di atas*). Satuan subjek ditunjukkan (*tujuan pengkajian ini*), satuan predikat ditunjukkan oleh verba kopula (*adalah*), dan satuan pelengkap ditunjukkan oleh rangkaian satuan perincian yang berupa tiga klausa, yaitu:

1. *mengevaluasi sejauh mana efisiensi dan efektivitas administrasi perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku;*

2. *masalah yang menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas sistem yang ada diidentifikasi*;
3. *merumuskan saran-saran perbaikan yang bersifat aplikatif terhadap administrasi perencanaan dan penganggaran tahunan*.

Secara struktural, ketiga perincian tersebut di atas masing-masing berpola: (1) Predikat (verba aktif)–Subjek; (2) Subjek–Predikat (verba pasif); (3) Predikat (verba aktif)–Subjek.

Satuan pengisi fungsi sintaksis predikat (*adalah*) dalam kalimat tersebut dapat diopsionalkan atau ditiadakan sehingga ketiga satuan perincian tersebut berubah menjadi pengisi fungsi sintaksis predikat, seperti yang dapat dilihat pada uraian berikut.

- (1a) *Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan pengkajian ini [mengevaluasi sejauh mana efisiensi dan efektivitas administrasi perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku].*
- (2a) *Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan pengkajian ini [diidentifikasi penyebab rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas sistem yang ada]*
- (3a) *Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan pengkajian ini [merumuskan saran-saran perbaikan yang bersifat aplikatif terhadap administrasi perencanaan dan penganggaran tahunan].*

Jika diamati kembali, kalimat rincian (1a--3a) di atas (setelah predikat *adalah* diopsionalkan) dapat dinyatakan bahwa satuan-satuan perinciannya tidak memperlihatkan keparalelan bentuk.

Satuan perincian nomor satu diawali oleh verba berprefiks *me-*, dalam hal ini satuan *mengevaluasi*. Satuan perincian nomor dua diawali oleh nomina yang berfungsi sebagai pengisi fungsi sintaksis subjek dan diikuti oleh verba berprefiks *di-*, dalam hal ini

satuan *diidentifikasi*. Satuan perincian nomor tiga diawali oleh verba berprefiks *me-*, dalam hal ini satuan *merumuskan*. Jadi, ada dua versi bentuk satuan perincian kalimat, yaitu (a) satuan perincian yang diawali dengan prefiks *me-*, (b) satuan perincian yang diawali dengan prefiks *di-*. Oleh karena itu, kedua versi bentuk satuan perincian pada kalimat majemuk (11a) tersebut harus diparalelkan.

Strategi yang ditempuh untuk memaralelkan satuan-satuan perincian kalimat (11a) ialah dengan cara pemerian prefiks *me-* pada setiap awal satuan perincian nomor satu, dua, dan tiga. Atau dengan kata lain, verba di dalam perincian tersebut diubah menjadi bentuk aktif, seperti pada kalimat ubahan (11b). Kemudian, strategi pamaralelan kedua dapat diaplikasikan, yaitu dengan pemerian prefiks *di-* pada setiap awal satuan perincian kalimat. Dengan kata lain, bentuk satuan perincian tersebut dipasifkan, seperti pada kalimat ubahan (11c).

Berikut di bawah ini adalah tiga kalimat yang telah mengalami perubahan sehingga mengandung perincian yang paralel.

- (10b) *Tingkat efisiensi dan efektivitas sistem penganggaran tersebut kurang karena masih ada*
 1. *masalah antara DIK dan DIP yang tumpang tindih*
 2. *prakiraan dana pembangunan yang belum dihitung secara seksama,*
 3. *prosedur keuangan yang terlalu kompleks,*
 4. *penjadwalan dan pencocokan antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya yang lemah,*
 5. *proses revisi yang terlalu panjang,*
 6. *daya dukung khususnya sumber daya manusia yang lemah, dan*
 7. *dominasi pemegang keputusan untuk persetujuan kegiatan oleh Bappenas yang masih sangat terasa.*

(11b) Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan pengkajian ini adalah:

1. Mengevaluasi sejauh mana efisiensi dan efektivitas administrasi perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi masalah yang menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas sistem yang ada.
3. Merumuskan saran-saran perbaikan yang bersifat aplikatif terhadap administrasi perencanaan dan penganggaran tahunan.

(11c) Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan pengkajian ini adalah

1. sejauh mana efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku **dievaluasi**,
2. sejauh mana masalah-masalah yang menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas sistem yang ada **diidentifikasi**, dan
3. sejauh mana saran-saran perbaikan yang bersifat aplikatif terhadap administrasi perencanaan dan penganggaran tahunan **dirumuskan**.

PENUTUP

Suatu kalimat yang baik harus mengandung unsur-unsur yang lengkap. Kelengkapan unsur kalimat sekurang-kurangnya harus memenuhi dua hal, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Sementara itu, sebagai bagian ragam bahasa tulis, kalimat bahasa tulis harus mempunyai satuan-satuan sintaksis yang jelas dan sejajaran atau paralel. Satuan-satuan pengisi fungsi sintaksis atau satuan fungsional kalimat harus mengandung gagasan yang jelas agar pembaca lebih mudah untuk memahami gagasan yang terkandung dalam kalimat. Oleh karena itu, salah satu

norma kebahasaan yang berkaitan dengan kejelasan gagasan dalam kalimat ialah paralelisme bentuk.

Paparan sebelas kalimat di atas mengandung satuan rincian yang tidak paralel, yaitu ketidakparalelan dalam bentuk. Ketidakparalelan yang ditemukan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) ketidakparalelan bentuk dalam kata, (2) ketidakparalelan bentuk dalam frasa, dan (3) ketidakparalelan bentuk dalam klausa.

Untuk satuan-satuan pengisi fungsi sintaksis kalimat, satuan fungsional kalimat, dan satuan-satuan rincian kalimat yang memperlihatkan ketidakparalelan bentuk, strategi pamaralelan bentuk dapat diaplikasikan dengan pengimbuhan, pengaktifan, atau pemasifan.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan *et al.* 2008. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, Zaenal dan Amran Tasai. 2009. *Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- KBBI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia.
- Kentjono, Djoko. 2005. "Morfologi". Dalam *Pesona Bahasa. Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Keraf, Gorys. 1991. *Tatabahasa Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Atas*. Ende-Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Kridalaksana, Harimurti *et al.* 1985. *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.

Parera, Daniel Jos. 1980. "Kalimat Efektif" dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Tahun VI No. 1. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sudaryanto. 1986. *Metode Linguistik: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sugono, Dendy. 1991. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Priastu.

Zulkarnain dan Budiono Isas. 2000. *Petunjuk Praktis Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Yunus, M. *et al.* 2013. *Keterampilan Menulis*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.

Sumber Data

1. Surat kabar *Kompas* (Februari—Maret, 2010),

2. Surat kabar *Media Indonesia* (Februari—Maret, 2010),

3. Laporan teknis, seperti laporan *Lembaga Administrasi Negara* (2000), dan

4. Majalah *Badan Pengkajian dan Penerangan Teknologi (BPPT)* (No. LVIII, 2000).